

PEMETAAN IMPLEMENTASI SPIP PADA POLITEKNIK A

¹Elfitri Santi, ²Endrawati, ³Irda Rosita

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Limau Manis, Pauh, Padang, Sumatera Barat 25163
e-mail: elfitrisanti@gmail.com, eentanjung@gmail.com, irda.rosita@yahoo.com

Abstrak. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah diberlakukan untuk seluruh instansi. Pemerintah telah mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk mengendalikan seluruh kegiatan dengan menyelenggarakan SPIP. Tahapan penyelenggaraan SPIP meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pemetaan dilakukan pada tahap persiapan, yaitu diagnosis awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pengendalian intern pada Politeknik A, yang mencakup keberadaan kebijakan dan prosedur serta implementasi dari kebijakan dan prosedur tersebut terkait penyelenggaraan sub unsur SPIP. Metode penelitian adalah statistik deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner dan Focus Group Discussion. Hasil penelitian berupa pemetaan SPIP pada politeknik A meliputi lima unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Berdasarkan pemetaan diketahui bahwa kondisi lingkungan pengendalian penerapan 5 unsur SPIP berada pada posisi 2,62 (dalam skala 4). Dan unsur kegiatan pengendalian berada pada posisi yang lebih baik yaitu 2,7. Unsur penilaian resiko memiliki nilai rendah, yaitu 2,58 dan unsur informasi dan komunikasi memiliki nilai tertinggi yaitu 2,86. Sedangkan unsur pemantauan memiliki nilai terendah yaitu 2,35.

Kata kunci: pemetaan, lingkungan pengendalian, risk analysis, kegiatan pengendalian, informasi, komunikasi, pemantuan pengendalian intern

1. Pendahuluan

Good Corporate Governance (GCG) berasal dari istilah “corporate governance” yang berarti tata kelola perusahaan, merupakan suatu bentuk analogi antara pemerintahan suatu Negara dengan pemerintahan dalam suatu perusahaan (Becht et al., 2002 dalam Solihin, 2009). Dalam pemerintahan suatu negara terdapat berbagai kelompok dengan berbagai kepentingan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu muncul sebuah konsep corporate governance dalam mengatasi konflik kepentingan tersebut agar kerja pemerintahan dapat dikelola dengan baik.

Komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme pada berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik.

Kenyataannya, amanah ini belum bisa diwujudkan karena belum adanya persepsi yang sama mengenai konfigurasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyeluruh. Sistem ini masih bersifat parsial ditingkat kementerian dan di tingkat pemerintahan daerah. Belum ada Sistem Pengendalian Intern secara Nasional yang mengurus masalah pengawasan strategik dalam skala nasional (Widayadi, 2007).

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempertegas komitmen pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme pada berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintah. PP 60 tahun 2008 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 58 ayat 1 yang menyatakan bahwa “ dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh”.

Sistem Pengendalian Intern yang dimaksud dalam PP 60 tahun 2008 merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (*operating*), keandalan pelaporan keuangan (*financial reporting*), pengamanan asset negara (*safeguarding*) dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (*compliance*). Tujuan dari ditetapkannya PP 60 tahun 2008 ini adalah untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu kementerian / lembaga yang komit dalam pelaksanaan SPIP. Keseriusan Kemendikbud terhadap pelaksanaan SPIP, dilatarbelakangi oleh tidak tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendikbud tahun 2010 dan 2011. Sehingga tahun 2012 Kemendikbud gencar melaksanakan sosialisasi SPIP dan mempertegas pentingnya penerapan SPIP disetiap satuan kerja (satker) dalam bentuk pelatihan SPIP. Komitmen ini dipertegas juga dengan dikeluarkannya Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kemendikbud.

Berdasarkan PP 60 tahun 2008, penyelenggaraan SPIP melalui 5 (lima) tahapan. Tahapan pertama adalah *Knowing* adalah tahapan sosialisasi dan diklat. Tahapan kedua adalah melakukan pemetaan/*diagnostic assessment* yang dimaksudkan untuk memperoleh area perbaikan (*area of improvements*) terhadap unsur-unsur SPIP yang dipetakan dan juga melakukan perbaikan yang diperlukan terhadap unsure-unsur tersebut, melalui bimbingan dan konsultasi. Tahapan ketiga adalah *Norming* yaitu setiap instansi pemerintah perlu segera membangun dan memperbaiki infrastruktur untuk penyelenggaraan SPIP pada organisasinya. Tahapan keempat adalah *Forming* yaitu melakukan internalisasi terhadap infrastruktur yang dibangun. Proses internalisasi ini perlu selalu dipantau dan dievaluasi secara terus menerus oleh instansi pemerintah itu sendiri untuk dapat menilai apakah SPIP yang diinginkan telah terselenggara dengan baik atau masih memerlukan perbaikan secara terus menerus. Terakhir adalah tahap kelima yaitu *Performing* yaitu pengembangan berkelanjutan melalui *learning by doing*, karena kondisi yang dihadapi setiap instansi pemerintah selalu dinamis, dan dinamika tersebut akan terus menimbulkan perubahan, yang akan memerlukan pengembangan yang berkelanjutan sehingga SPIP yang dibutuhkan setiap instansi pemerintah dapat berlangsung secara baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pengendalian intern pada Politeknik A, yang mencakup keberadaan kebijakan dan prosedur serta implementasi dari kebijakan dan prosedur tersebut terkait penyelenggaraan sub unsur SPIP. Metode penelitian adalah statistik deskriptif. Hasil identifikasi ini akan disajikan dalam peta sistem pengendalian intern.

2. Kajian Literatur

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mengendalikan seluruh kegiatan dengan menyelenggarakan sistem pengendalian intern. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui :

- a. Kegiatan yang efektif dan efisien
- b. Laporan keuangan yang dapat diandalkan
- c. Pengamanan aset negara, serta
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perspektif SPIP, mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dimana SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern tersebut merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan lainnya.

a. Lingkungan Pengendalian

Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) didalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian (delapan sub unsur) yang baik akan meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai. Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang demikian diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakannya. Komitmen ini juga merupakan hal yang penting bagi terselenggaranya unsur-unsur SPIP lainnya.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi sub unsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika (sub unsur 1.1) organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti. Selanjutnya, dibuat pernyataan bersama untuk melaksanakan integritas dan nilai etika tersebut dengan menuangkannya pada suatu pernyataan komitmen untuk melaksanakan integritas. Pernyataan ini berupa fakta

(pernyataan tertulis) tentang integritas yang berisikan komitmen untuk melaksanakannya. Selain itu, kompetensi (sub unsur 1.2) yang merupakan kewajiban pegawai di bidangnya masing-masing.

Komitmen yang dilaksanakan secara periodik tersebut perlu dipantau dan dalam pelaksanaannya perlu diimbangi dengan adanya kepemimpinan yang kondusif (sub unsur 1.3) sebagai pemberi teladan untuk dituruti seluruh pegawai. Agar dapat mendorong terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan aturan kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk diketahui bersama. Demikian juga, struktur organisasi perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan (sub unsur 1.4) dengan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat (sub unsur 1.5). Terhadap struktur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis secara berkala tentang bentuk struktur yang tepat. Diperlukan pembinaan sumber daya manusia (sub unsur 1.6) yang tepat sehingga tujuan organisasi tercapai. Disamping itu, keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) (sub unsur 1.7) perlu ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat berperan secara efektif. Hal lain yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan lingkungan pengendalian yang baik adalah menciptakan hubungan kerja sama yang baik (sub unsur 1.8) diantara instansi pemerintah yang terkait. Untuk membangun kondisi yang nyaman sebagaimana disebutkan di atas, maka lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan sebagai situasi dimana pemimpin selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian risiko. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif inilah, maka muncul kewajiban bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian risiko di instansinya.

b. Penilaian risiko

Penilaian risiko dengan dua sub unsurnya, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategic yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi risiko (sub unsur 2.1) atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, kemudian menganalisis risiko (sub unsur 2.2) yang memiliki probability kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

c. kegiatan pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian risiko dilakukan respon atas risiko dan membangun kegiatan pengendalian yang tepat (sub unsur 3.1 sampai dengan 3.11). Dengan kata lain, kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk merespon risiko yang dimiliki instansi pemerintah dan memastikan bahwa respon tersebut efektif.

d. Informasi dan Komunikasi

Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan (sub unsur 4.1 dan 4.2).

e. Pemantauan pengendalian intern

Perlu dilakukan pemantauan (sub unsur 5.1 dan 5.2) secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Kelima unsur SPIP tersebut dapat berlaku baik pada tingkat instansi secara keseluruhan maupun pada fungsi/aktivitas tertentu saja.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif yang bersifat *case study* pada politeknik negeri yang ada di provinsi Sumatera Barat. Bertujuan untuk mempercepat penerapan SPIP di perguruan tinggi. Isu strategis yang diangkat dalam penelitian ini adalah masalah pemetaan SPIP yang ada di politeknik negeri, pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan dan tahap pelaporan sistem pengendalian SPIP.

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer kondisi pengendalian yang ada di politeknik negeri di Sumatera Barat dengan menggunakan pedoman sub unsur dalam penyelenggaraan SPIP berdasarkan PP 60 tahun 2008. Teknik pengumpulan data menggunakan seperangkat *instrument* (kuesioner) yang disusun secara terstruktur (tertulis) dan tidak terstruktur (sebagai panduan wawancara). Kuisisioner akan disebar kepada unsur pimpinan yang ada di Politeknik A. Selanjutnya dilakukan *Indepth Interview* dan membentuk *Focus Group Discussion* untuk mendapatkan data yang lengkap dan studi dokumentasi, serta observasi.

Kuesioner yang telah disebar, akan diolah dengan statistik deskriptif berdasarkan pedoman unsur SPIP dalam PP 60 tahun 2008. Hasil pemetaan akan dimuat dalam peta sistem pengendalian intern, yang memuat unsur SPIP yang telah diterapkan, penerapan yang belum memadai dan sub unsur belum diterapkan dan memberikan rekomendasi pada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam rangka penerapan SPIP.

Instrumen pada penelitian ini berpedoman pada PP 60 tahun 2008 tentang SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Profil Responden

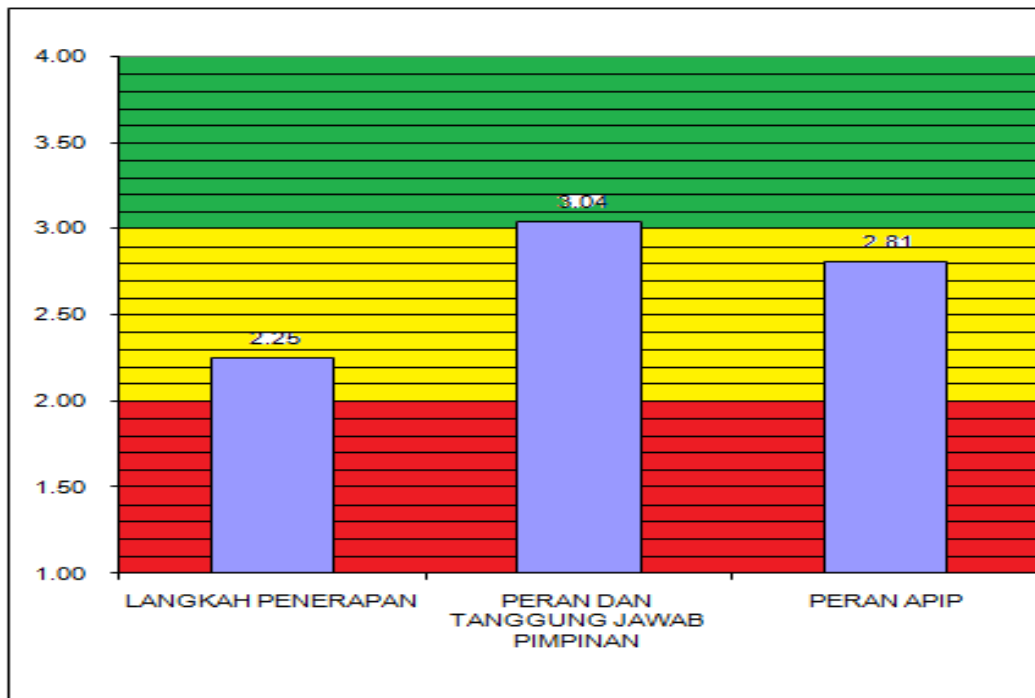
Responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah lebih kurang 75 orang. Untuk pengisian angket berupa pertanyaan tertutup di Politeknik berjumlah 50 responden sedangkan untuk pertanyaan terbuka berupa pertanyaan lisan dan wawancara berjumlah sekitar 25 orang responden. Jenis responden ada yang berasal dari pimpinan/pejabat struktural politeknik maupun pegawai biasa. FGD dengan pihak terkait juga dilakukan untuk menggali informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini. Disamping itu agar penelitian ini tidak menyimpang dan sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 diperlukan beberapa kali konsultasi dengan BPKP.

4.2 Hasil yang diperoleh

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah meliputi pemahaman SPIP, pemyarakatan SPIP, kondisi unsur SPIP, dan pencapaian tujuan SPIP.

4.2.1 Pemahaman SPIP

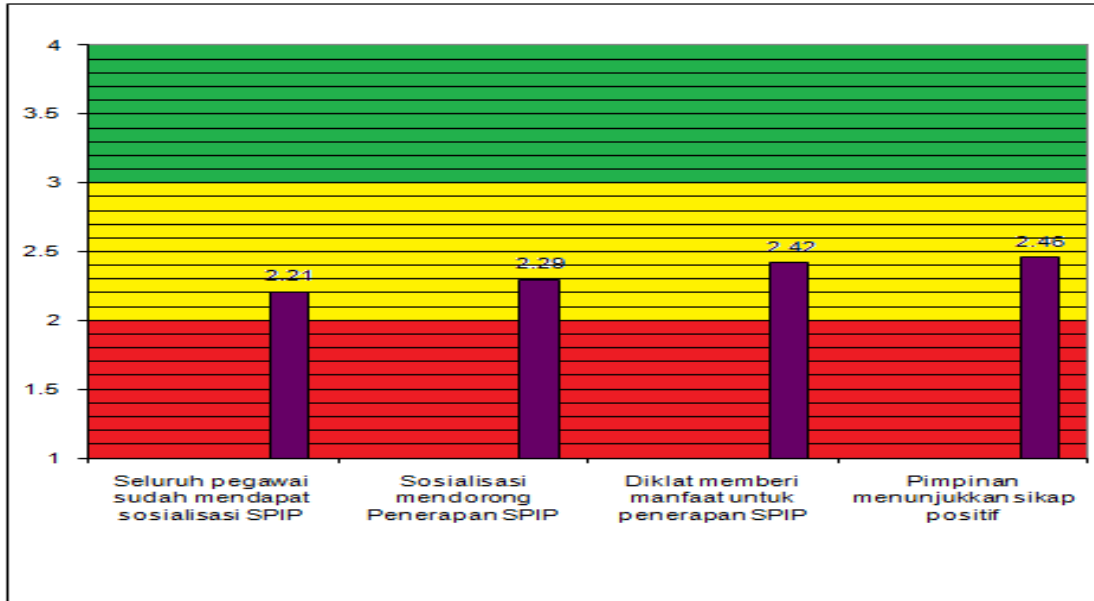
Pada gambar 1, dapat dilihat pemahaman pengelola terhadap SPIP, memiliki nilai 2,25 pada langkah penerapan artinya perlu penyempurnaan lebih baik lagi. Hal ini terjadi, karena memang Politeknik A belum memiliki panduan dan prosedur penerapan SPIP di Politeknik A. Peran dan tanggung jawab pimpinan terhadap SPIP cukup tinggi, begitu juga dengan peran APIP. Jadi pada tahap ini, yang perlu disempurnakan adalah langkah penerapan yang jelas.



Gambar 1. Pemetaan Pemahaman SPIP

4.2.2 Pemasyarakatan (Diseminasi)

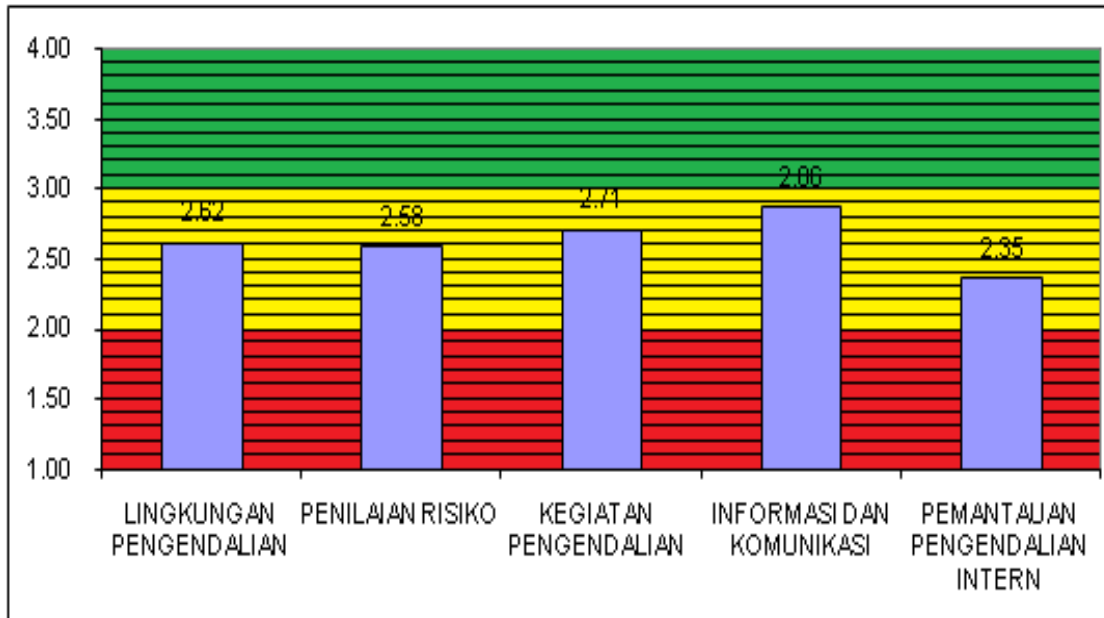
Pada gambar 2, dapat dilihat diseminasi yang dilakukan Politeknik A belum optimal. Masih banyak pegawai yang belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan dalam penerapan SPIP, walaupun pimpinan sudah menunjukkan sikap positif.



Gambar 2. Pemetaan Pemasyarakatan SPIP

4.2.3 Kondisi Unsur SPIP

Pada gambar 3, terlihat bahwa unsur lingkungan pengendalian masih lemah. Hal ini terjadi karena komitmen pimpinan yang masih kurang dan kompetensi pegawai yang belum memadai sesuai dengan bidang tugasnya. POLITEKNIK A juga perlu menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi masing-masing.



Gambar 3. Pemetaan unsur SPIP

Unsur penilaian resiko masih rendah, yaitu 2,58. Hal ini karena pimpinan dalam mengambil keputusan belum melakukan analisis resiko dengan baik dan belum menentukan dampaknya terhadap pencapaian tujuan Politeknik A.

Unsur kegiatan pengendalian, sudah lebih baik, yaitu 2,71, namun Politeknik A perlu mengaitkan pengendalian dengan proses penilaian resiko dan dilaksanakan untuk kegiatan pokok di Politeknik A, yaitu proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma perguruan tinggi).

Unsur informasi dan komunikasi merupakan unsur yang paling tinggi, jika dibandingkan dengan unsur SPIP lainnya, yaitu 2,86. Hal ini karena memang POLITEKNIK A sudah memiliki IT yang bagus dan lengkap untuk memberikan informasi kepada civitas akademika.

Pemantauan pengendalian intern merupakan unsur yang mendapatkan skor paling lemah, yaitu 2,35. Hal ini disebabkan karena mekanisme penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan reviu yang belum berjalan efektif.

4.2.4 Kondisi Pencapaian Tujuan SPIP

Kondisi pencapaian tujuan SPIP dalam bidang keandalan laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diandalkan karena masih kurangnya SDM yang kompeten dalam penyusunan laporan keuangan, dan waktu untuk melakukan reviu laporan keuangan sangat singkat. Untuk pengamanan aset belum berjalan dengan tertib dan akuntabel. Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, selain itu belum dilakukan inventarisasi dan penilaian aset secara optimal, keterbatasan SDM juga menjadi penghalang tercapainya tujuan SPIP.

Dalam mencapai efektifitas dan efisiensi kegiatan di Politeknik A masih perlu dilakukan usaha lebih seperti melaksanakan manajemen berbasis kinerja, menetapkan sumber daya yang lebih optimal, menetapkan standar pelayanan minimal dan juga mengkomunikasikan tujuan organisasi kepada seluruh pegawai. Perlunya komitmen pimpinan untuk menerapkan peraturan yang berlaku dan mensosialisasikan peraturan tersebut kepada seluruh pegawai. Bagi pegawai yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi serta bagi pegawai yang berprestasi akan diberikan apresiasi.

Penulis melaksanakan FGD dengan pihak terkait untuk mengetahui lebih dalam tentang penerapan 5 unsur SPIP di Politeknik A, dari hasil FGD tersebut dapat diidentifikasi kondisi dan hal-hal yang perlu diperbaiki (*areas of improvement*) sebagai berikut :

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa semua unsur – unsur SPIP telah diterapkan di Politeknik A berada pada area kuning (waspada/hati-hati) dan belum maksimal terutama pada unsur lingkungan pengendalian. Dari hasil pemetaan diketahui bahwa kondisi penerapan 5 unsur SPIP memiliki skor nilai 2,62 pada skala nilai 1-4 atau berada pada area kuning. Politeknik A harus berhati-hati untuk mengantisipasi penurunan kualitas penyelenggaraan SPIP. Unsur penilaian resiko memiliki nilai paling rendah, yaitu 2,58 (masih area kuning) dan paling tinggi pada unsur informasi dan komunikasi yaitu 2,86. Hal ini disebabkan karena kurangnya penilaian resiko dan lingkungan pengendalian yang belum bagus, terutama pada komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan SPIP di Politeknik A.

5. Kesimpulan

- a. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal yaitu : tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan terhadap aset

- negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60 tahun 2008).
- b. Unsur lingkungan pengendalian masih lemah. Hal ini terjadi karena komitmen pimpinan yang masih kurang dan kompetensi pegawai yang belum memadai sesuai dengan bidang tugasnya. Politeknik A juga perlu menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi masing-masing. Untuk meningkatkan unsur lingkungan pengendalian, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan, termasuk penegakan aturan terkait reward dan punishment. Juga diperlukan pelatihan sesuai bidang kerja serta penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi masing-masing.
 - c. Unsur penilaian resiko masih rendah, yaitu 2,58. Hal ini karena pimpinan dalam mengambil keputusan belum melakukan analisis resiko dengan baik dan belum menentukan dampaknya terhadap pencapaian tujuan Politeknik A. Untuk itu perlu dibuat panduan untuk melakukan analisis resiko dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan Politeknik A serta prosedur pendukungnya.
 - d. Unsur kegiatan pengendalian, sudah lebih baik, yaitu 2,71, namun Politeknik A perlu mengaitkan pengendalian dengan proses penilaian resiko dan dilaksanakan untuk kegiatan pokok di Politeknik A, yaitu proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma perguruan tinggi).
 - e. Unsur informasi dan komunikasi merupakan unsur yang paling tinggi, jika dibandingkan dengan unsur SPIP lainnya, yaitu 2,86. Hal ini karena memang Politeknik A sudah memiliki IT yang bagus dan lengkap untuk memberikan informasi kepada civitas akademika.
 - f. Pemantauan pengendalian intern merupakan unsur yang mendapatkan skor paling lemah, yaitu 2,35. Hal ini disebabkan karena mekanisme penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan reviu yang belum berjalan efektif. Untuk itu perlu dibuat pedoman tindak lanjut hasil audit dan reviu serta penegakan aturan yang tegas dan jelas bagi unit agar melakukan tindak lanjut sesuai temuan

Daftar pustaka

- Amin. Moh, MPd. Panduan Praktis Penelitian Tindakan Kelas Inspirasi, Grobongan. April 2011
- Departemen Pendidikan Nasional (2003), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Jakarta : Balai Pustaka
- Effendi, Muh. Arief. 2009. The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasmah, Ridha. 2010. Menyongsong Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Blog Bappenas
- Lonto, Miryam Pingkan. 2011. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Pemerintah Kota Bitung: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dan Dampaknya Terhadap Good Governance. Tesis Universitas Gajah Mada. Tidak dipublikasi
- Pemerintah Indonesia, 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Biro Peraturan Perundang-undangan Bagian Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Jakarta
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010

- Santi, Elfitri. 2013 “Dampak Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Perguruan Tinggi”. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Padang*
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bagian Kedua, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Situs Resmi BPKP, Sekilas SPIP www.bpkp.go.id/spip/konten/400/Sekilas-SPIP.bpkp (27 April 2013)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Wira, Variyetmi. 2013. “Pengaruh budaya kerja dan komitmen organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi”. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Taman siswa Padang*.